

MEDIA	Tribun Bali
TANGGAL	Kamis, 4 Desember 2014
JUDUL	Organisasi Kebebasan Pers Internasional “Geruduk” Tribun Bali
PENULIS	Ni Ketut Sudiani



TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sejumlah organisasi internasional dan regional menyempatkan diri berkunjung ke Dapur Redaksi Tribun Bali guna mendiskusikan berbagai permasalahan pers di Indonesia, Khususnya di Bali, Kamis (4/12/2014).

Organisasi yang tergabung dalam International Partnership Mission to Indonesia itu sepakat hingga

kini masih ada intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan.

"Ya, kami juga sharing tentang kondisi dan situasi kebebasan pers di negara masing-masing. Sebagai outputnya, ada empat fokus utama yang kami perlu follow up," ungkap Eko Mariadi, mantan ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Hadir pada kesempatan tersebut, Yayasan TIFA, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), dan AJI. Serta organisasi Internasional Article 19, Centre for Law and Democracy, Committee to Protect Journalists, Freedom House, International Federation of Journalists, dan International Media Support.

Rombongan tersebut, diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun Bali, Sunarko dan awak redaksi Tribun Bali.

Selama diskusi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, mereka begitu tertarik mengetahui berbagai isu yang berkembang di Pulau Dewata serta langkah yang diambil Tribun Bali sebagai media terbaru yang dibuka di Bali.

Sunarko menyampaikan cara penyajian berita di Tribun Bali yang tidak hanya mengandalkan edisi cetak, melainkan juga mengedepankan sisi online serta e-paper, sehingga pembaca dapat semakin cepat mengakses kabar terkini.

"Humanitas juga menjadi roh kami, sehingga selalu mencoba menampilkan kisah-kisah kemanusiaan,"

imbuh Sunarko.

Para peserta juga memberi apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Tribun Bali selama ini, menjadi media yang independen dan kredibel. (*)

Sumber: [Tribun Bali](#)

MEDIA	Tempo.co
TANGGAL	Friday, 5 December 2014
JUDUL	RI Asked to Open Press Access to Papua
PENULIS	Rofiqi Hasan
<p>TEMPO.CO, Denpasar - The International Partnership Mission to Indonesia, an international and regional organization working in the freedom of expression, urged the government of Indonesia to open more access for foreign journalists to cover news in Papua.</p> <p>In a meeting organized by the Independent Journalist Alliance (AJI) and Tifa Foundation, several organizations signed the statement, namely: Article 19, Committee to Protect Journalists (CPJ), Freedom House, International Federation of Journalists (IFJ), International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism, and Southeast Asian Press Alliance (SEAPA).</p> <p>Jane Worthington from IFJ Asia-Pacific said there had not been official policy that banned foreign journalists from entering Papua. "However, the government tends to complicate foreign journalists with visa and other requirements," said Jane. Michael Karanicolas from Canada-based Center for Law and Democracy (CLD) confirmed that such policy would end up disadvantaging Indonesia.</p> <p>Earlier in August, two French journalists, Thomas Dandois and Valentine Bourrat, were detained for using tourist visas for journalism purposes. The two were found guilty by the court and sentenced to two and a half months in prison. The trial triggered global outrage from the world press organization.</p> <p>Source: Tempo.com</p>	

MEDIA	Beritasatu.com
TANGGAL	Jumat, 5 Desember 2014
JUDUL	Kebebasan Pers di Indonesia Dinilai Masih Terancam
PENULIS	Yustinus Paat/NAD

Jakarta - Sejumlah organisasi internasional dan regional di bidang kebebasan berekspresi yang tergabung dalam International Partnership Mission to Indonesia (IPMI) menilai, kebebasan pers dan hak akan kebebasan berekspresi di Indonesia masih terancam.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam IPMI di antaranya Article 19, Center for Law and Democracy (CLD), Committee to Protect Journalists (CPJ), Freedom House, International Federation of Journalists (IFJ), International Media Support (IMS), Open Society Foundation Programme on Independent Journalism (OSFPIJ), dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA).

"Mulai tanggal 1 sampai 5 Desember 2014, kami (IPMI) telah menemui berbagai pemangku kepentingan di bidang media dan kebebasan pers, mulai dari Menkominfo Rudiantara hingga berbagai kelompok jurnalis dari Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Yogyakarta," ujar Manajer SEAPA Kulachada Chaipipat dalam konferensi pers di Warung Cikini, Jakarta pada Jumat (5/12).

Selain Kulachada, hadir juga sebagai pembicara perwakilan dari Article 19 Judy Taing, Direktur Deputy Asia-Pasifik IFJ Jane Worthington, Direktur Proyek Freedom House Karin D. Karlekar, Staf legal CLD Michael Karanicolas, peneliti CPJ Summit Galhotra dan program manajer untuk media dan informasi Yayasan TIFA R. Kristiawan.

Kulachada beranggapan, kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis terus terjadi yang menghambat penciptaan kehidupan media yang merdeka dan aman. Secara khusus, katanya, banyak pelaku serangan terhadap jurnalis masih menikmati impunitas atau kekebalan hukum.

"Kekerasan terhadap jurnalis adalah sebuah ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan memadai kepada jurnalis dan menyelidiki secara tuntas ancaman atau kekerasan terhadap mereka," tegasnya.

Michael Karanicolas dari Center of Law and Democracy mengungkapkan, hak digital di Indonesia masih di bawah ancaman. Menurutnya, hal ini disebabkan sanksi yang begitu keras dari UU ITE untuk berekspresi di media *online*.

"Kami mencatat, standar internasional memandatkan pencemaran nama baik (defamasi) harus diperlakukan sebagai perkara perdata, bukan perkara pidana," tuturnya.

Dia juga mengharapkan sanksi bagi pernyataan secara *online* seharusnya juga tidak melebihi sanksi untuk pernyataan yang sama yang disampaikan di media cetak, penyiaran, atau secara *offline*.

"Mekanisme *website filtering* yang memblokir banyak sekali *website* juga masih bermasalah karena ada *website* dengan isi positif yang ikut terblokir," tambahnya.

Sementara Direktur Deputi IFC Jane Worthington menilai media di Indonesia, terutama *mediamainstream*, jarang mempublikasikan berita-berita toleransi, kebhinekaan, kelompok minoritas, tradisional, dan terpingkiran.

"Ini disebabkan karena pemusatan dan oligarki kepemilikan media yang berpusat di kota, khususnya Jakarta. Ini ancaman serius terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Jane juga mengaku kecewa karena akses jurnalis asing ke Indonesia terutama daerah-daerah sensitif seperti Papua sangat dibatasi. Jurnalis asing, katanya, jika memasuki Papua harus memperoleh izin tambahan dari berbagai kementerian dan kantor pemerintahan.

"Kebijakan yang menyulitkan liputan ini menghambat pemahaman negara-negara lain terhadap Indonesia, yang justru merugikan Indonesia sendiri," kata Worthington.

Sumber: Beritasatu.com

MEDIA	Merdeka.com
TANGGAL	Jumat, 5 Desember 2014
JUDUL	Jurnalis Asing Protes Diskriminasi Peliputan di Indonesia
PENULIS	(tyo)
<p>Merdeka.com - International Partnership Mission to Indonesia (IPMI), mengaku kecewa adanya pembatasan akses masuk jurnalis asing ke Indonesia. Saking ketatnya, jurnalis asing yang tengah melakukan tugasnya malah menjadi sorotan.</p> <p>Pembatasan akses jurnalis asing ke Indonesia ini terjadi di kawasan perbatasan Papua juga menjadi sorotan tajam bagi organisasi jurnalis internasional ini, dimana jurnalis asing harus memperoleh izin tambahan dari berbagai kementerian dan kantor pemerintah, itu pun sangat jarang diberikan.</p> <p>"Kebijakan yang menyulitkan liputan ini menghambat pemahaman negara-negara lain terhadap Indonesia, yang justru merugikan bangsa Indonesia sendiri," keluh Michael Karanicolas dari Center for</p>	

Law and Democracy, dalam pernyataan persnya pada Kamis (4/12) di Denpasar.

Dalam hal ini, kata Michael, IPMI merupakan organisasi internasional dan regional di bidang kebebasan berekspresi yang terdiri dari Article 19, Centre for Law and Democracy, Committee to Protect Journalists, Freedom House, International Federation of Journalists, International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism dan the Southeast Asian Press Alliance ini rupanya sudah sejak lama menyuarkan misi tersebut.

"Kami sudah sejak zaman Presiden SBY sudah mulai bergerak, tidak karena saat ini pemerintahan Jokowi kami baru mulai tidak, sejak transisi demokrasi pada 1998, telah banyak perbaikan signifikan dalam kehidupan media Indonesia. Bahwa masih terjadi masalah dimana kebebasan pers dan hak akan kebebasan berekspresi masih terancam," kata Michael.

Anggota International Federation of Journalists, Jane Worthington menambahkan bahwa banyak pelaku serangan terhadap jurnalis masih menikmati impunitas atau kekebalan hukum. Meskipun telah ada kemajuan di beberapa kasus, termasuk dalam pembunuhan Anak Agung Prabangsa di Bali, sebagian besar kasus tetap tidak terselesaikan, bahkan ada yang tidak diselidiki sama sekali.

Selain itu, organisasi ini juga menyoroti dimana pengguna internet di Indonesia sangat besar namun hak digital masih berada di bawah ancaman, salah satunya akibat sanksi yang begitu keras dari UU ITE untuk berekspresi di media online.

"Kami mencatat bahwa standar internasional memandatkan pencemaran nama baik (defamasi) harus diperlakukan sebagai perkara perdata, bukan perkara pidana. Sanksi bagi pernyataan secara online seharusnya juga tidak melebihi sanksi untuk pernyataan yang sama yang disampaikan di media cetak, penyiaran, atau secara offline. Mekanisme website filtering yang memblokir banyak sekali website juga masih bermasalah karena ada website dengan isi positif yang ikut terblokir," kata Jane Worthington.

Sumber: Merdeka.com

MEDIA	Kompas (Cetak hal.2)
TANGGAL	Sabtu, 6 Desember 2014
JUDUL	Regulasi Penyiaran dan Akses Digital Perlu Direvisi



JAKARTA, KOMPAS — Meskipun kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia semakin berkembang sejak era Reformasi, masih ada sejumlah persoalan terkait hegemoni kepemilikan media dan regulasi yang menghambat kebebasan berekspresi di media dalam jaringan. Solusi yang bisa diambil untuk menjawab persoalan itu, antara lain, merevisi regulasi terkait penyiaran dan akses digital.

Demikian disampaikan sejumlah lembaga nirlaba internasional yang tergabung dalam Misi Kemitraan Internasional untuk Indonesia, Jumat (5/12), di Jakarta.

Lembaga yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi itu meliputi Article 19, Centre for Law and Democracy, Committee to Protect Journalists, Freedom House, International Federation of Journalists, International Media Support, Open Society Foundations Programme on Independent Journalism, dan The South East Asian Press Alliance (SEAPA). Sejumlah lembaga mitra di dalam negeri juga hadir.

Manajer Kampanye SEAPA Kulachada Chaipipat Lacada menyatakan, diperlukan reformasi atas regulasi penyiaran agar kepemilikan media penyiaran tidak terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal. Yang terjadi saat ini, media penyiaran di Indonesia dimiliki segelintir pengusaha. Ironisnya, media itu juga terafiliasi partai politik dan pemberitaannya terpengaruh kepentingan politik pemilik modal. Hal itu terbukti saat Pemilu 2014.

Kondisi ini merugikan publik karena informasi yang diperoleh media itu menjadi tidak beragam dan terpengaruh kepentingan politik tertentu. Di sisi lain, wartawan juga dirugikan karena tidak bisa membuat berita yang independen. Kondisi ini memerlukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Staf Legal Centre for Law and Democracy Michael Karanicolas menyoroti masalah kebebasan berekspresi yang di media dalam jaringan terbelenggu ketentuan pencemaran nama baik yang diatur UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Manajer Program Media dan Informasi Yayasan Tifa R Kristiawan berharap, pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat menghadirkan iklim kebebasan pers yang lebih baik melalui revisi sejumlah regulasi itu.**(why)**